ANALISIS EFEKTIVITAS PADAT KARYA TUNAI DANA DESA

(Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

TESIS

Oleh:

CHAMIM CHUSNA JAZULI

NIM 501190004

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2021

ANALISIS EFEKTIVITAS PADAT KARYA TUNAI DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO)

ABSTRAK

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan dari Padat Karya Tunai Dana Desa. Secara teknis Pemerintah Desa mengutamakan pemanfaatan SDA, SDM beserta teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, megurangi tingkat kemiskinan, mengurangi jumlah penderita gizi buruk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun masalah-masalah yang dapat menghambat keberhasilan program Dana Desa antara lain terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya, kurangnya kompetensi Aparat Pemerintahan Desa sebagai pengelola Dana Desa berpotensi menyebabkan program ini menjadi kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo, (2) Menganalisis Efektivitas pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo, (3) Menganalisis Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah dua Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Desa Gandu sebagai Desa berkembang dan Desa Siwalan sebagai Desa Maju. Pengumpulan data melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Yaitu dengan memaparkan sedetil mungkin program Dana Desa sehingga diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat. Diamati secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa mulai kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedia sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian berjalan dengan efektif. (2) Melalui pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran dapat dikategorikan cukup efektif. (3) Padat Karya Tunai Dana Desa telah memberikan dampak positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa.

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Chamim Chusna Jazuli, NIM 501190004** dengan judul : **"Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 8 April 2021

Pembimbing,

Dr. Luhur Prasetiyo, M.E.I
NIP 19781122006041002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Chamim Chusna Jazuli, NIM 501190004, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: **"Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa *(Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 26 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Zahrul Fata, Ph.D.** **NIP 197504162009011009** Ketua Sidang		
2	**Iza Hanifuddin, Ph.D.** **NIP 196906241998031002** Penguji Utama		
3	**Dr. Luhur Prasetiyo, M.E.I.** **NIP 197801122006041002** Anggota Penguji		

Ponorogo, 1 Mei 2021
Direktur Pascasarjana,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	CHAMIM CHUSNA JAZULI
NIM	:	501190004
Fakultas	:	Pasca Sarjana
Program Studi	:	S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	:	ANALISIS EFEKTIVITAS PADAT KARYA TUNAI DANA DESA (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2021

Penulis

CHAMIM CHUSNA JAZULI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277
Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	CHAMIM CHUSNA JAZULI
NIM	:	501190004
Fakultas	:	Pasca Sarjana
Program Studi	:	S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	:	ANALISIS EFEKTIVITAS PADAT KARYA TUNAI DANA DESA (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika kelimuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 1 Mei 2021

Penulis,

METERAI TEMPEL 10000 923AEAJX199101260

CHAMIM CHUSNA JAZULI

DAFTAR ISI

hlm.

HALAMAN SAMPUL DALAM..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN..……....…… iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI …….. v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK…….. viii

ABSTRACT……...……..……. x

DAFTAR ISI…..... xv

DAFTAR TABEL..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian ……....…….. 7

E. Kajian Terdahulu ……..…... 8

F. Metode Penelitian ……..…...……..… 10

G. Sistematika Pembahasan ……..… 18

BAB II EFEKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Padat Karya Tunai…….……... 20

1. Pengertian Padat Karya Tunai …..…… 20
2. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa …….…… 21
3. Manfaat Padat Karya Tunai Dana Desa ……..……... 22
4. Dampak Padat Karya Tunai Dana Desa……..…… 23
5. Prioritas Dana Desa Dalam Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018…… 23
6. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa Tahun 2018 …….. 26
7. Prioritas Dana Desa Dalam Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 ….....… 30

8. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa Tahun 2019…….….. 33
B. Efektifitas ……...……..… 38
1. Pengertian Efektivitas…… 38
2. Pendekatan Dalam Mengukur Efektivitas …… 40
C. Pemberdayaan……..……..... 44
1. Pengertian Pemberdayaan ……..... 44
2. Pendekatan Dalam mengukur Pemberdayaan ….....… 47

BAB III PADAT KARYA TUNAI DANA DESA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian….....… 51
1. Keadaan Geografis Kecamatan Mlarak ……... 51
2. Sosial Dan Kesejahteraan…..……...… 53
3. Kondisi Ekonomi……...… 55

B. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ……... 56
C. Penggunaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo……..... 61
1. Desa Gandu……..……...…… 61
2. Desa Siwalan…….……..… 79
D. Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo…….… 98
1. Desa Gandu……..……..…… 99
2. Desa Siwalan……..……..…… 100

BAB IV EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DANA DESA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ……...…… 106

B. Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo…….…….. 112
C. Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ……..... 133
1. Desa Gandu……..… 133
2. Desa Siwalan ……...… 136

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……..…...… 140
B. Saran-saran…….. 142

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PONOROGO

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Padat Karya Tunai Desa merupakan bentuk pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran serta keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan SDA, SDM dan teknologi lokal dalam rangka megurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan *stunting*. [1] *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masalah gizi akut yang diakibatkan oleh sangat kurangnya asupan gizi dalam tubuh sehingga kurang optimal dalam tumbuh kembangnya. [2]

Penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun

[1] Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, 2.
[2] Ibid., 3.

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.[3] Musyawarah Desa merupakan proses musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.[4] BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[5]

Adapun RPJM Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan dan ditetapkan maksimal 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa.[6] Sedangkan RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa pada jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan, disusun oleh Pemerintah Desa mulai bulan juli dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM

---

[3] Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Bab II, 22.

[4] Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Bab 1, 4.

[5] Ibid., 4.

[6] Ibid., 4.

Desa.[7] Baik RPJM Desa maupun RKP Desa keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu – satunya dokumen perencanaan Desa yang kemudian menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa.

APB Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.[8] Melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan dari Padat Karya Tunai Dana Desa.[9]

---

[7] Ibid., 4.
[8] Ibid., 4.
[9] Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa 2018 untuk Padat Karya Tunai.

PONOROGO

Pemerintah Desa sebagai pelaksana program Dana Desa diharapkan secara intensif melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, diwujudkan dalam penyediaan sarana dan pra sarana desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan ketrampilan, kemampuan, pengetahuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan kompetensi agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja, dibentuk tim Pendamping Desa yang terdiri dari tim ahli. Pendamping Desa bertugas untuk mendampingi serta mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo, terutama dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mlarak sebagai sasaran utama dalam program tersebut.

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam mengukur keberhasilan sebuah program. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil *(output)* dari tujuan yang telah direncanakan, dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui pendekatan sasaran *(goals approach)*[10] Dalam hal ini, pengukuran efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa diukur melalui *output* yang dihasilkan apakah dapat menunjang kegiatan pembanguan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang atau masyarakat lebih mempunyai daya *(power)* dari pada sebelumnya. Pemberdayaan tidak hanya usaha peningkatan daya atau kemampuan semata akan tetapi juga pemberian peran, kewenangan bahkan tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah adanya pemberdayaan dapat menumbuhkan sikap kemandirian. Tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat

PONOROGO

[10] Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), 55.

yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.[11]

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan yang menyangkut Padat Karya Tunai Dana Desa menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul "ANALISIS EFEKTIVITAS PADAT KARYA TUNAI DANA DESA (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ?

PONOROGO

[11] Soleh, *"Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan",* (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian Padat Karya Tunai Dana Desa. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo serta dapat memberikan kontribusi moril mengenai Padat Karya Tunai Dana Desa, khususnya bagi para pihak terkait sehingga dapat menjadi bahan studi dan evaluasi dalam menentukan program – program pada masa mendatang.

E. Kajian Terdahulu

Secara spesifik, belum ada yang membahas tentang efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi terdapat beberapa kajian penelitian terkait program Dana Desa diantaranya adalah karya dari Susi Eka Prayamita, dari Universitas Hasanudin Makassar ditulis tahun 2017 dengan judul "*Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*".

Menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Dana desa dalam pelaksanaan program bidang pembangunan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2016 dapat di ukur dengan menggunakan pendekatan sasaran (*goal approach*) yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dengan melihat *output* kegiatan yaitu perealisasian program dan pemanfaatan program tergolong sangat efektif.

Selanjutnya adalah karya ilmiah dengan judul *"Efektivitas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo"* karya dari Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditulis tahun 2016.

Kesimpulan dari tulisan tersebut mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif dalam upaya pengembangan ekonomi Desa, memberdayakan masyarakat Desa Bangunjiwo. Pada proses perencanaan pembangunan, masyarakat Desa Bangujiwo selalu aktif ikut berpartisipasi terutama pada kegiatan musrenbag sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik. masyarakat aktif dalam

memberikan usulan juga evaluasi dalam hal pengawasan program pemerintah Desa serta aktif memberikan masukan, kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, diketahui bahwa Dana Desa memang sudah efektif, baik dalam pembangunan Desa maupun pengembangan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, pada penelitian ini penulis tidak hanya terfokus pada hasil (*output*) semata, akan tetapi juga pada aspek proses yang dilakukan, karena hasil yang baik akan tercapai melalui proses yang baik pula. Oleh karena itu, aspek proses dalam penelitian ini akan diperdalam sebagaimana pendalaman pada aspek hasil yang dicapai.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan disiplin keilmuan ekonomi syari'ah dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Aparatur Pemerintahan Desa dan perilaku (tindakan) yang diamati. Jenis

penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden[12] Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Aparatur Pemerintahan Desa Gandu dan Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peran penelitilah yang akan menentukan keseluruhan skenarionya.[13] Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen lain sebagai penunjang. Keterlibatan peneliti di lapangan dimulai sejak peneliti melakukan studi pendahuluan. Kemudian hasil studi tersebut diseminarkan dan diperbincangkan guna

---

[12] Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 38.

[13] Ibid., 117.

memperoleh saran masukan dari rekan seprofesi dan dari para ahli. Apabila data pendukung yang diperlukan dirasa belum memadai, maka peneliti kembali ke lapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan objek penelitian pada (2) Dua Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana Padat Karya Tunai Dana Desa. Adapun Desa yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah Desa maju dan Desa berkembang yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis, foto dan dokumen sebagai sumber data tambahan. Adapun data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2018 dan 2019, hal ini dilakukan agar

data yang diperoleh lebih akurat dan fokus terhadap tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak bisa memenuhi standar data yang ditetapkan.[14] Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai (informan).[15] Wawancara dalam penelitin ini adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka dalam penelitian ini adalah orang yang diwawancarai (informan) mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui pula maksud dan tujuan diwawancarai. Teknik wawancara adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur

PONOROGO

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

[15] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 105.

dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi secara detail dan mendalam. Informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara *purposive sampling. Purposive sampling* ialah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu.[16] Artinya peneliti perlu membuat pedoman agar dapat memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi adalah Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut dengan pengobservasi (*obsever*) dan pihak yang diobservasi disebut dengan terobservasi (*observee*).[17] Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan yaitu pada saat peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti hanya sebagai pengamat tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini dilakukan untuk

PONOROGO

[16] Sugiyono, *MetodePenelitianPendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 124

[17] AbdurrahmatFathoni, *MetodologiPenelitian Dan TeknikPenyusunanSkripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 104.

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sumber non manusia, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). Dokumentasi didefinisikan sebagai setiap bahan tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.[18]

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

PONOROGO

[18]Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hal. 149

kepada orang lain.[19] Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep Miles & Hubermen yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*[20]

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi difokuskan terhadap fokus penelitian. Setelah data direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penelti. Diuraikan dan disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan adalah tahap dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah semua data sudah diuraikan dan disusun secara sistematis lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PONOROGO

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 334.

[20]*Ibid.*, 337.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan *(validitas)* dan keandalan *(reliabilitas).*[21] Pengujian keabsahan data (kredibilitas data) dilakukan dengan teknik pengamatan dan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.[22]

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibiltas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda misalnya dengan cara awal wawancara lalu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi. Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibiltas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu atau situasi yang berbeda. Waktu juga sering

[21] Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.
[22]Sugiyono, 372.

mempengaruhi kredibilitas data. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.[23]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyajikanya ke dalam 5 bab berikut ini :

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teori. Berisi pengertian efektivitas, pendekatan dalam pengukuran efektivitas, pengertian pemberdayaan, pendekatan dalam pengukuran pemberdayaan, pengertian Padat Karya Tunai Dana Desa, prinsip penggunaan Padat Karya Tunai Dana Desa, manfaat Padat Karya Tunai Dana Desa, Dampak Padat Karya Tunai Dana Desa, Sifat Padat Karya Tunai Dana Desa, prioritas Dana Desa tahun 2018, prioritas Dana Desa tahun 2019.

[23] *Ibid.*, 373-374.

Bab ketiga, paparan data dan temuan penelitian. Berisi data umum meliputi : keadaan geografis Kecamatan Mlarak, sosial dan kesejahteraan, kondisi ekonomi masyarakat. Data khusus meliputi: pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, penggunaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan dampak pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo serta temuan penelitian.

Bab keempat, pembahasan. Berisi tentang: analisis pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, analisis efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan analisis dampak Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

EFEKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Padat Karya Tunai Dana Desa

1. Pengertian Padat karya Tunai

Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Padat Karya Tunai menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran dan gizi buruk dengan cara memberikan kesempatan bekerja sementara, menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana Desa.[1]

Sumber dana Padat Karya Tunai Dana Desa sendiri adalah dari dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan

[1] Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai, Bab 1, 1.

pemberdayaan masyarakat Desa.[2] Dana Desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.[3] Hal ini diwujudkan dengan skema *cash for work* yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan pemberian upah kerja secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[4] Adapun sifat kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa adalah :

a. Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, artinya perencanaan dan

PONOROGO

[2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat"* (Jakarta: t.p., 2017), 12.
[3] Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa*, 36.
[4] Ibid., 38.

pelaksanaan kegiatan dilakukan mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketigan.

b. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan produktifitas masyarakat Desa.
c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung, harian atau mingguan.

3. Manfaat Padat Karya Tunai Dana Desa

Adapun manfat dari Dana Desa itu sendiri untuk Padat Karya Tunai adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.
b. Menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong – royong dan partisipasi masyarakat.
c. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal.
d. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.
e. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.

4. Dampak Padat Karya Tunai Dana Desa

Terdapat pula dampak dalam penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai diantaranya :

a. Terjangkaunya aksesbilitas masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekononi.
b. Turunya tingkat kemiskinan perdesaan.
c. Turunya tingkat pengangguran perdesaan.
d. Turunya jumlah balita kurang gizi di perdesaan.
e. Turunya arus migrasi dan urbanisasi.

5. Prioritas Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.[5]

a. Prioritas kegiatan bidang pembangunan Desa.

1) Sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi
2) Sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan

[5] Pedoman umum tentang prioritas Penggunaan dana desa, Bab 1, 3-21.

3) Sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa meliputi usaha ekonomi pertanian produktif (ketahanan pangan) serta usaha non produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan hidup.
5) Sarana prasarana lain yang sesuai kewenangan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

b. Prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Prioritas pemberdayaan masyarakat Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga dapat menjadi mandiri.[6]

PONOROGO

[6] Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan dana Desa Tahun 2018, Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, 8.

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.
2) Pengembangan pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
4) Dukungan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
5) Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan penyandang disabilitas.
6) Dukungan pengelolaan lingkungan hidup.
7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM Desa.
9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat Desa.
10) Pengembangan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga.

11) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa lainya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan pada musyawarah Desa.

6. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa Tahun 2018

Dalam perencanaan program kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa[7]

a. Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur dasar.
2) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi

PONOROGO

[7] Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2018, tentang Prioritas Penggunaan Dana desa, 7-8.

yang berorientasi pada ketahanan pangan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan Desa.

3) Pembentukan BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif berorientasi pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Pembentukan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des.
5) Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

b. Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa berkembang.

1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk penguatan usaha ekonomi berskala produktif difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung

pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

3) Penguatan BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Penguatan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
5) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa.
6) Pengembangan lapangan kerja untuk masyarakat Desa.

c. Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa maju dan Desa mandiri

1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran. untuk mendukung perluasan usaha ekonomi berskala produktif berorientasi pada ketahanan

pangan difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3) Perluasan usaha BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Perluasan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
5) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.

6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli Desa.
7) Perluasan lapangan kerja masyarakat Desa.

7. Prioritas Dana Desa dalam bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2019

Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.[8]

a. Prioritas kegiatan bidang pembangunan Desa.

1) Sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energy, informasi dan komunikasi.
2) Sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
3) Sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa meliputi usaha ekonomi pertanian produktif (ketahanan pangan) maupun usaha ekonomi non pertanian produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang

[8] Pedoman umum tentang prioritas Penggunaan dana desa, Bab 1, 3-21.

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.

4) Sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan hidup.
5) Sarana prasarana lain yang sesuai kewenangan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

b. Prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Prioritas pemberdayaan masyrakat Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga dapat menjadi mandiri.[9]

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

---

[9] Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan dana Desa Tahun 2018, Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, 8.

4) Pengembangan ketahanan keluarga.
5) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
6) Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan penyandang disabilitas.
7) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
8) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, konflik sosial serta penangananya.
9) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa.
10) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh masyarakat Desa.
11) Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12) Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian produktif.
13) Pengembangan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga.

14) Kegiatan pemberdayaan masyarakat lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan pada musyawarah Desa.

8. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa Tahun 2019

Dalam perencanaan program kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa[10]

a. Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur dasar.
2) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi

PONOROGO

[10] Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana desa, 7-8.

yang berorientasi pada ketahanan pangan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan Desa.

3) Pembentukan BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif berorientasi pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Pembentukan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des.
5) Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
6) Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa berkembang.

1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk penguatan usaha ekonomi berskala produktif difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3) Penguatan BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Penguatan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
5) Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa.
7) Pengembangan lapangan kerja untuk masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. **Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa maju dan Desa mandiri**

1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran. untuk mendukung perluasan usaha ekonomi berskala produktif berorientasi pada ketahanan pangan difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3) Perluasan usaha BUM Desa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.
4) Perluasan usaha ekonomi kelompok masyarakat Desa melalui permodalan yang dikelola BUM Des, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

bagi usaha ekonomi produktif di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.

5) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli Desa
7) Perluasan lapangan kerja masyarakat desa.

PONOROGO

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif, jika tujuan atau sasaran yang ditentukan telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan oleh setiap organisasi. Senada dengan pendapat Caster I. Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.[11]

Secara etimologi, efektivitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan mempunyai arti keadaan berpengaruh, keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Adapun secara terminologi, para ahli mendefinisikannya sebagai berikut:

---

[11]Yogi Eka Prastiya, *"Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo",* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014), 42.

a. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai semakin tinggi pula efektivitasnya.
b. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa efektivitas merupakan suatu gambaran mengenai pencapaian unjuk kerja maksimal dan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) bisa tercapai.
c. Habey dalam Mangkunegara, efektif adalah tepat mengenai sasaran, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
d. Menurut Richard Steers, efektivitas ditentukan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.
e. Robert Chambers mengemukakan bahwa secara komprehensif, efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan lembaga atau organisasi melaksanakan tugas pokoknya dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan ukuran keberhasilan dari suatu organisasi maupun suatu program, oleh karena itu efektivitas sangat bergantung pada proses yang dilakukan. Karena proses memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi atau program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misalnya, untuk sebuah perusahaan, efektivitas bisa berarti besar laba yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjanya, atau jika lembaga pendidikan yang menginterpretasikannya, maka efektivitas berarti kualitas lulusan peserta didiknya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk mengukur suatu efektivitas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan diantaranya :

a. Menurut Martani dan Lubis, tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi :[12]
   1) Pendekatan sumber *(resource approach)* mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan keberhasilan organisasi memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
   2) Pendekatan proses *(process approach)* melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
   3) Pendekatan sasaran *(goals approach)* mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil *(output)* yang sesuai dengan rencana.

PONOROGO

[12] Hari Lubis, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

b. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan:[13]

1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya berfokus pada pencapaian sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai,

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Jalan yang diambil dalam melakukan barbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan .

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditentukan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang.

Perencanaan yang matang yaitu memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi di masa mendatang.

PONOROGO

[13] Sondang P. Siagian, "*Manajemen Sumber Daya Manusia",* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),77.

5) Penyusunan program yang tepat.

Suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Jika tidak, maka para pelaksana program akan kurang memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya.

6) Tersedianya sarana dan pra sarana kerja.

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Hal ini bergantung pada sarana dan pra sarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena itu pelaksanaan organisasi harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan marjinnal untuk memenuhi kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya demi perbaikan hidupnya.[14] Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat dalam hal perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.[15]

PONOROGO

---

[14] Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.

[15] Ibid.,117.

Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari terjemahan *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:[16]

a. *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain.
b. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan pengertian pemberdayaan secara istilah, beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut, diantaranya:

a. Menurut Priyono dan Marnis, pemberdayaan adalah memberikan daya yang lebih dari sebelumnya, dalam hal ini meliputi tenaga, kemampuan, kekuatan, peranan, wewenang dan tanggung jawab.[17]
b. Wibowo mendefisikan pemberdayaan sebagai proses menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara

---

[16] Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 155.

[17] Priyono, Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008), 63.

memberikan rasa kepercayaan dan kewenangan sehingga akan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.[18]

c. Menurut Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan juga memicu terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang yang tak berdaya, memberikan pengaruh yang lebih besar pada lingkup politik secara lokal maupun nasional.[19]

d. Menurut Suharto terdapat beberapa definisi tentang pemberdayaan diantaranya :[20]

   1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang lemah atau tidak beruntung.

   2) Pemberdayaan merupakan proses menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Kemampuan memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup

---

[18] Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 414.

[19] Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 64.

[20] Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, 64.

PONOROGO

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.

3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kekuasaan melalui pengukuhan struktur sosial.

4) Pemberdayaan adalah cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai dan berkuasa atas kehidupannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang atau masyarakat lebih berdaya dari pada sebelumnya. Pemberdayaan tidak hanya pada usaha peningkatan daya atau kemampuan saja, akan tetapi juga pada pemberian peran, kewenangan serta tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah adanya pemberdayaan mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

2. Pendekatan dalam Mengukur Pemberdayaan

Secara implisit pemberdayaan masyarakat mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi-aspirasi masyarakat yang tertampung harus dirumuskan menjadi

kegiatan nyata. Birokrasi harus berjalan efektif, artinya mampu melaksanakan kebijakan publik dengan sebaik mungkin guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang.[21]

Mardikanto dan Soebiato merumuskan tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.[22]

a. Bina Manusia

Merupakan upaya yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu didasari pada tujuan pembangunan yaitu untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia melalui pelatihan rutin maupun penyuluhan, upaya penguatan/pengembangan kapasitas baik kapasitas pengembangan individu, pengembangan

PONOROGO

[21] Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* 110-111.

[22] Soleh, *"Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan",* (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87.

entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas system.

b. Bina Usaha.

Menjadi suatu usaha penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak perubahan atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) akan terasa sia-sia. Sebaliknya bina manusia harus mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan dan pengembangan jejaring dan kemitraan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat guna terciptanya kesejahteraan (ekonomi) masyarakat.

c. Bina Lingkungan.

Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan serta pemanfaatan sumber daya secara tepat dan efektif agar dapat menjaga sumber daya alam yang dimiliki. Semenjak berkembangnya pembangunan berkelanjutan, dampak lingkungan menjadi sangat penting. Terlihat dengan dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel.

Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

PONOROGO

BAB III

PADAT KARYA TUNAI DANA DESA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kecamatan Mlarak

Kecamatan Mlarak merupakan salah satu dari dua puluh satu (21) kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo. Dua puluh satu (21) Kecamatan tersebut, yaitu : Kecamatan Babadan, Kecamatan Badegan, Kecamatan Balong, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Jambon, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kauman, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Sukorejo.

Luas wilayah Kecamatan Mlarak kurang lebih 3.720 Ha. Secara administratif, Kecamatan Mlarak tersusun dari 15 (lima belas) Desa, yaitu: Desa Tugu, Desa Candi, Desa Totokan, Desa Ngrukem, Desa Siwalan, Desa Joresan,

Desa Nglumpang, Desa Gontor, Desa Gandu, Desa Jabung, Desa Bajang, Desa Mlarak, Desa Serangan, Desa Suren, dan Desa Kaponan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulung
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siman dan Kecamatan Jetis
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siman
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambit.

Kecamatan Mlarak terdiri 49 (empat puluh sembilan) Dusun, 104 (seratus empat) Rukun Warga (RW), dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT). Luas daerah menurut Desa di Kecamatan Mlarak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Luas Dasa di Kecamatan Mlarak

No	Desa	Luas Daerah (Hektar)
1	Tugu	271
2	Candi	586
3	Totokan	422
4	Ngrukem	208
5	Siwalen	195

6	Joresan	162
7	Nglumpang	151
8	Gontor	106
9	Gandu	194
10	Jabung	209
11	Bajang	149
12	Mlarak	262
13	Serangan	86
14	Suren	313
15	Kaponan	406
	Jumlah	**3720**

Sumber: Monografi Kecamatan Mlarak.

2. Sosial dan Kesejahteraan

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Mlarak sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sejumlah 35.579 jiwa yang terdiri dari penduduk beragama Islam berjumlah 35.569 jiwa, penduduk beragama Kristen Protestan berjumlah 8 Jiwa, penduduk beragama Katolik 1 jiwa dan penduduk memeluk agama lainnya atau kepercayaan berjumlah 1

jiwa. Untuk sektor pendidikan, di kecamatan Mlarak terdapat 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar (SD), 4 (empat) Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 (empat) SMP, 4 (empat) Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 (satu) SMA, dan 3 (tiga) Madrasah Aliyah (MA), serta ada 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sarana kesehatan, kecamatan Mlarak terdapat 2 buah Puskesmas Pembantu, 51 buah Posyandu, dan 13 buah Polindes. Dari sektor tempat peribadatan kecamatan Mlarak memiliki 69 Masjid, 161 buah Mushola, dan 3 buah Gereja Protestan. Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Mlarak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Jumlah Dusun dan Juulah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Mlarak

Desa	**Dusun**	**Agama**			
		Islam	**Kristen**	**Katolik**	**Lainnya**
Tugu	5	2779			
Candi	3	2025			
Totokan	3	2027			
Ngrukem	4	2649			
Siwalan	3	2579	1		
Joresan	3	1813	1		1
Nglumpang	4	2007			

Gontor	2	2464			
Gandu	4	2588			
Jabung	3	2897	2		
Bajang	3	2355			
Mlarak	4	3012		1	
Serangan	2	1096			
Suren	3	2455	3		
Kaponan	3	2823	1		
Jumlah	**49**	**35569**	**8**	**1**	**1**

Sumber: Data Monografi Kecamatan Mlarak.

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdiri atas 13 Desa/Kelurahan, dan 49 Dusun. Penduduk mayoritas beragama Islam, yaitu sebesar 35.569 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar wilayah desa– desa di Kecamatan Mlarak. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Mlarak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka

mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang di dukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik.

Dari segi pertanian, wilayah kecamatan Mlarak memiliki luas panen tanaman sayuran menurut jenis tanaman, sebagai berikut:

a. Bawah Merah seluas 55 Ha
b. Cabai seluas 160 Ha
c. Jahe seluas 3500 m^2
d. Laos seluas 2507 m^2
e. Kencur seluas 405 m^2
f. Kunyit seluas 14.213 m^2

Luas area tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kecamatan Mlarak, diantaranya adalah:

a. Kelapa seluas 39,87 Ha
b. Tebu seluas 11,25 Ha
c. Tembakau seluas 2,73 Ha

B. Pelaksanaaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam tesis ini menekankan kepada aspek efektivitas Padat Karya Tunai yang menyebutkan Dana Desa digunakan untuk

pemberdayaan dan pembanguan Desa dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Desa.[23] Padat Karya Tunai Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel oleh pelaksana program yang berarti bahwa Dana Desa harus dikelola secara baik dan transparan. [24]

Dari lima belas (15) Desa di Kecamatan Mlarak, penulis mengambil dua (2) Desa sebagai sampel perealisasian Padat Karya Tunai Dana Desa. Pengambilan sampel ini di tidak hanya difokuskan pada Desa maju saja tapi juga pada Desa berkembang.[25] Kedua Desa tersebut meliputi :

1. Desa Gandu
2. Desa Siwalan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Aparat Pemerintahan Desa beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dzulfan selaku Sekretaris Desa Gandu mengenai pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Gandu

---

[23] Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai, Bab 1, 3.
[24] Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai, Bab 2, 2.
[25] Ibid.,

"Pada dasarnya segala program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa adalah untuk kepentingan masyarakat Desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam pelaksanaan program Dana Desa, Pemerintah Desa melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada".[26]

Hal senada disampaikan oleh Bapak Farid selaku Sekretaris Desa Siwalan, menurut beliau segala tata cara pelaksanaan program Dana Desa telah diatur dalam undang-undang.

"Pemerintahan Desa telah menjalankan Padat Karya Tunai Dana Desa sesuai dengan peraturan tentang Dana Desa karena semua ada undang-undangnya".[27]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa mengacu aturan perundang-undangan. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran,

---

[26] Dzulfan, wawancara, Gandu, 09 Februari 2020
[27] Farid, Wawancara, Siwalan , 10 Februari 2021.

pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.[28]

Selanjutnya, hasil wawancara tentang pelaksanaan program dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Perencanaan

   Perencanaan dilakukan Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP tiap Desa. Rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, maka rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

   Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, dilengkapi dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

PONOROGO

[28] Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai, Bab 2, 2.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran belanja kegiatan.

3. Penatausahaan

   Penatausahaan dilakukan Bendahara tiap Desa. Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan

   Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh setiap Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

   Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

PONOROGO

C. Penggunaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Adapun prioritas Padat Karya Tunai Dana Desa tahun 2018 dan tahun 2019 adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dari lima belas (15) Desa di Kecamatan Mlarak, penulis mengambil dua (2) Desa sebagai objek perealisasian Padat Karya Tunai Dana Desa. Pengambilan objek ini di tidak hanya difokuskan pada Desa maju saja tapi juga pada Desa berkembang. Kedua Desa tersebut meliputi :

1. Desa Gandu

a. Realisasi APBDES Pemerintah Desa Gandu Tahun 2018.[29]

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa
   a) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, sumber Dana PAD dan ADD
   b) Kegiatan operasional kantor Desa, sumber Dana PAD dan ADD

[29] Peraturan Desa Gandu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c) Kegiatan operasional BPD, sumber Dana PAD dan ADD
d) Kegiatan operasional RT/RW, sumber Dana ADD
e) Kegiatan pengelolaan keuangan Desa, sumber Dana PAD,ADD,PBH dan DLL.
f) Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa, sumber Dana ADD.
g) Kegiatan perencanaan pembangunan Desa, sumber Dana ADD.
h) Kegiatan pengelolaan informasi Desa, sumber Dana ADD dan PBH.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
a) Kegiatan pembangunan sarana prasarana kantor Desa sumber Dana PBH dan PBK.
b) Kegiatan pengadaan penerangan lampu lingkungan, sumber Dana Desa (APBN)
c) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase, sumber Dana Desa (APBN)
d) Kegiatan pembangunan jalan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)
e) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber Dana Desa (APBN)

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan
   a) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa, sumber Dana ADD
   b) Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban sumber Dana PAD dan PBH.
   c) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sumber Dana ADD.
   d) Kegiatan pembinaan keseniaan lokal lainya sumber Dana PAD, ADD dan PBK.
   e) Kegiatan peringatan Hari Besar Nasional sumber Dana PAD dan ADD
4) Bidang pemberdayaan masyarakat
   a) Kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD sumber Dana ADD.
   b) Kegiatan pengelolaan posyandu sumber Dana Desa (APBN) dan PBK.
   c) Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat sumber Dana Desa (APBN).
   d) Kegiatan pemberdayaan keluarga berencana sumber Dana PAD dan ADD.
   e) Kegiatan bantuan insentif Guru PAUD/TK sumber Dana Desa (APBN)

f) Kegiatan pelatihan, pengadaan, pengembangan sumber Dana Desa (APBN)

g) Kegiatan pendirian dan pengembangan BUM Desa, sumber Dana Desa (APBN)

h) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa, sumber Dana Desa (APBN)

i) Kegiatan pendataan dan penyusunan profil Desa dan peta, sumber Dana ADD.

j) Kegiatan pengembangan kapasitas paralegal Desa, sumber Dana Desa (APBN)

5) Bidang Tidak Terduga

a) Keadaan darurat, sumber Dana PAD

Dari paparan diatas, diketahui bahwa pemerintah Desa Gandu telah merealisasikan program Desa tahun 2018 yang bersumber dari seluruh pendapatan Desa. Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018, disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun realisasi Padat Karya Tunai Dana Desa (APBN) untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut[30] :

[30] Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Gandu Tahun 2018

1) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
   a) Pengadaan penerangan lampu lingkungan
   b) Pembangunan dan pemeliharaan drainase
   c) Pembangunan jalan pemukiman
   d) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
2) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
   a) Kegiatan pelatihan, pengadaan, pembangunan
   b) Kegiatan pengembangan kapasitas pelatihan paralegal Desa
   c) Kegiatan pengelolaan posyandu
   d) Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat
   e) Kegiatan bantuan insentif Guru taman belajar
   f) Kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDesa
   g) Pelatihan penguatan kesiagaan masyarakat Desa

Terlihat bahwa pemerintah Desa Gandu telah menyelesaikan 4 Jenis kegiatan pembangunan Desa dan 7 Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pada beberapa bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan, peningkatan SDM dan bidang ekonomi. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gandu telah merujuk pada tujuan dari program Dana Desa.

Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi , penerangan jalan, drainase dan irigasi yang lancar sebagai pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa melalui kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang kesehatan. Sedangkan program pendirian dan pengembangan BumDes akan memajukan perekonomian masyarakat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri, salah satu warga yang tergabung dalam kader Posyandu Desa Gandu mengenai manfaat Dana Desa dalam bidang kesehatan.

"Dana Desa memberikan manfaat yang besar terhadap kemajuan para kader Posyandu Desa. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan para kader Posyandu dalam bidang kesehatan, kemudahan dalam mendapatkan sarana dan prasarana dan kemudahan-kemudahan lainnya".[31]

PONOROGO

[31] Sri, wawancara, Gandu, 20 Maret 2021

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Imam, salah satu warga yang tergabung dalam Gapoktan Desa Gandu mengenai manfaat Dana Desa dalam bidang pertanian.

"Melalui Dana Desa ini, petani merasa terbantu dengan dibangunnya sarana dan pra sarana pertanian karena dengan sarana-sarana tersebut memudahkan dalam mendapatkan air untuk tanaman padi".[32]

b. Realisasi APBDES Pemerintah Desa Gandu Tahun 2019.[33]

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   a) Penyelenggaraan belanja Siltap dan tunjangan
      (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sumber Dana PAD dan ADD.
      (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, sumber Dana ADD.

[32] Imam, wawancara, Gandu, 20 Maret 2021.

[33] Peraturan Desa Gandu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sumber Dana ADD.

(4) Penyediaan operasinal Pemerintah Desa, sumber Dana ADD dan PBH.

(5) Penyediaan tunjangan BPD, sumber Dana ADD

(6) Penyediaan operasiaonal BPD, sumber Dana ADD.

(7) Penyediaan insentif/ operasional RT/RW, sumber Dana ADD.

(8) Penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa, sumber Dana PAD.

(9) Penyediaan tambahan tunjangan Perangkat Desa, sumber Dana PAD.

(10) Penyediaan tunjangan kinerja BPD, sumber Dana PAD.

(11) Penyediaan tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa, sumber Dana PAD dan ADD.

PONOROGO

b) Penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa
   (1) Penyediaan sarana perkantoran/ pemerintahan, sumber Dana PBH
   (2) Pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Desa, sumber Dana PAD
   (3) Lain-lain sub bidang sarana prasarana Pemerintahan Desa, sumber Dana PBK
c) Pengelolaan administrasi kependudukan
   (1) Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran, sumber Dana ADD.
d) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan
   (1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa, sumber Dana ADD
   (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainya, sumber Dana PAD.
   (3) Penyusunan dokumen Perencanaan Desa, sumber Dana ADD
   (4) Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi, sumber Dana ADD
   (5) Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD, sumber Dana PAD dan PBK.

e) Sub Bidang Pertanahan

(1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sumber Dana PAD dan PBH.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a) Sub Bidang Pendidikan

(1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ Madrasah NonFormal, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Dukungan penyelenggaraan PAUD, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Bantuan insentif Guru taman belajar keagamaan, sumber Dana Desa (APBN).

b) Sub Bidang Kesehatan

(1) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kls Bumil, lansia, insentif) sumber Dana Desa (APBN) dan PBK.

PONOROGO

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Pemeliharaan jalan desa, sumber Dana Desa (APBN).

(2) Pemeliharaan gedung/ prasarana Balai Desa, sumber Dana Desa (APBN).

(3) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN).

(4) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan tani, sumber Dana Desa (APBN).

(5) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa, sumber Dana Desa (APBN).

(6) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gapura/ batas Desa, sumber Dana Desa (APBN).

(7) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan talud dan plesengan, sumber Dana Desa (APBN).

PONOROGO

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

(1) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan Sanitasi Pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas MCK umum, sumber Dana PBK

(3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan lingkungan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup

(1) Lain –lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sumber Dana Desa (APBN)

f) Sub Bidang Pariwisata

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata, sumber Dana Desa (APBN)

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

(1) Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat Desa, sumber Dana PBH.

b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

(1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa, sumber Dana PAD dan ADD.

(2) Penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI), sumber Dana PAD dan ADD.

c) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat

(1) Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD, sumber Dana ADD

(2) Pembinaan PKK, sumber Dana ADD.

d) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

(1) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana, sumber Dana PAD.

e) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa, sumber Dana Desa (APBN)

PONOROGO

f) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sumber Dana PAD dan ADD.

4) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat.

a) Sub Bidang Keadaan Darurat

(1) Penanganan keadaan darurat, sumber Dana PAD.

Diketahui bahwa pemerintah Desa Gandu telah merealisasikan program Desa tahun 2019 yang bersumber dari seluruh pendapatan Desa. Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019, disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun realisasi Padat Karya Tunai Dana Desa (APBN) untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut:[34]

PONOROGO

[34] Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Gandu Tahun 2019

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a) Sub Bidang Pendidikan

(1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ Madrasah NonFormal, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, sumber Dana Desa (APBN)

b) Sub Bidang Kesehatan

(1) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kls Bumil, lansia, insentif), sumber Dana Desa (APBN) dan PBK

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Pemeliharaan jalan Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pemeliharaan gedung/ prasarana Balai Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan tani, sumber Dana Desa (APBN)

(5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(6) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gapura/ batas Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(7) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan talud dan plesengan, sumber Dana Desa (APBN)

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

(1) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan lingkungan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup

(1) Lain –lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sumber Dana Desa (APBN)

f) Sub Bidang Pariwisata

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata, sumber Dana Desa (APBN)

2) Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumber Dana PAD dan Dana Desa (APBN)

b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa, sumber Dana Desa (APBN)

Diketahui bahwa pemerintah Desa Gandu telah menyelesaikan 15 Jenis kegiatan pembangunan Desa dan 2 Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pada beberapa bidang,

diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan, peningkatan SDM dan bidang ekonomi. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gandu telah merujuk pada tujuan dari program Dana Desa. Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dirasa perlu untuk segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan pemenuhan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa melalui bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

PONOROGO

2. Desa Siwalan

a. Realisasi APBDES Pemerintah Desa Siwalan Tahun 2018.[35]

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, sumber Dana ADD, PAD

b) Kegiatan operasional Kantor Desa, sumber Dana ADD

c) Kegiatan operasional BPD, sumber Dana ADD

d) Kegiatan operasional RT/RW, sumber Dana ADD

e) Kegiatan pengelolaan keuangan Desa, sumber Dana ADD dan PAD.

f) Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa, sumber Dana ADD

g) Kegiatan perencanaan pembangunan Desa, sumber Dana ADD

h) Kegiatan penyusunan produk Hukum Desa, sumber Dana ADD

PONOROGO

[35] Peraturan Desa Siwalan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

i) Kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, sumber Dana PAD.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

a) Kegiatan pengadaan penerangan lampu lingkungan, sumber Dana Desa (APBN)

b) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase, sumber Dana Desa (APBN)

c) Kegiatan pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan sampah, sumber Dana Desa (APBN)

d) Kegiatan pembangunan jalan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

e) Kegiatan pembangunan gorong-gorong, sumber Dana Desa (APBN)

f) Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, sumber Dana Desa (APBN)

g) Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sumber Dana Desa (APBN)

h) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saran dan prasarana, sumber Dana ADD, PBK dan PBK.

PONOROGO

3) Bidang Pembinaan Masyarakat

a) Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa, sumber Dana ADD.

b) Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, sumber Dana ADD.

c) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, sumber Dana ADD

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD & lembaga, sumber Dana ADD.

b) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, sumber Dana Desa (APBN)

c) Kegiatan pengelolaan Posyandu, sumber Dana Desa (APBN) dan PBK.

d) Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat, sumber Dana Desa (APBN)

e) Kegiatan pemberdayaan keluarga berencana, sumber Dana Desa (APBN)

f) Kegiatan bantuan insentif Guru PAUD/TK & Guru taman belajar, sumber Dana Desa (APBN)

PONOROGO

g) Kegiatan pelatihan dan pengelolaan pelayanaan pendidikan, sumber Dana Desa (APBN) dan PBK
h) Kegiatan pelatihan, pengadaan, pengembangan, sumber Dana Desa (APBN) dan PBH.
i) Kegiatan pendirian dan pengembangan BUM Desa, sumber Dana Desa (APBN)
j) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup, sumber Dana Desa (APBN)
k) Kegiatan pendataan dan penyusunan Profil Desa, sumber Dana Desa (APBN)
l) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi, sumber Dana Desa (APBN)
m) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya, sumber Dana Desa (APBN)
n) Kegiatan pemberdayaan usaha peningkatan pendapatan, sumber Dana PBK.

Dari data diatas, pemerintah Desa Siwalan telah merealisasikan program Desa tahun 2018 yang bersumber dari seluruh pendapatan Desa. Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018

disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun realisasi Padat Karya Tunai Dana Desa (APBN) untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut:[36]

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase
   b) Kegiatan pembanguan jalan pemukiman
   c) Kegiatan pengadaan penerangan lampu lingkungan
   d) Kegiataan pembangunan, pengembangan & pemeliharaan
   e) Kegiatan pembangunan gorong-gorong
   f) Kegiatan pengadaan & pemeliharaan sarana prasarana
   g) Kegiatan pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan sampah.
2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   a) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi.

[36] Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Siwalan Tahun 2018

b) Kegiatan pelatihan, pengadaan & pengembangan.
c) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat.
d) Kegiatan pengelolaan Posyandu.
e) Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat.
f) Kegiatan pemberdayaan Keluarga Berencana.
g) Kegiatan bantuan insentif Guru PAUD/TK & Guru taman Pendidikan.
h) Kegiatan pelatihan dan pengelolaan pelayanan Pendidikan.
i) Kegiatan pendataan dan penyusunan Profil Desa.
j) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
k) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya.
l) Kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDesa

Pemerintah Desa Siwalan telah menyelesaikan 7 Jenis kegiatan pembangunan Desa dan 12 Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pada beberapa bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan,

peningkatan SDM dan bidang ekonomi. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Siwalan telah merujuk pada tujuan dari program Dana Desa. Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dirasa perlu untuk segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan pemenuhan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa melalui bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pengembangan BUMDesa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

PONOROGO

b. Realisasi APBDES Pemerintah Desa Siwalan Tahun 2019[37]

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional

(1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sumber Dana ADD

(2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, sumber Dana ADD.

(3) Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, sumber Dana ADD

(4) Penyediaan operasional Pemerintah Desa, sumber Dana ADD, PAD dan PBH.

(5) Penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa, sumber Dana PAD

(6) Penyediaan tambahan tunjangan Perangkat Desa, sumber Dana PAD.

[37] Peraturan Desa Siwalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(7) Penyediaan tunjangan BPD, sumber Dana ADD dan PAD

(8) Penyediaan operasional BPD, sumber Dana ADD.

(9) Penyediaan insentif operasional RT/RW, sumber Dana ADD

(10) Penyediaan tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa, sumber Dana ADD dan PAD

b) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan

(1) Penyusunan dokumen Keuangan Desa, sumber Dana ADD dan PBH.

(2) Pengembangan Sistem Informasi Desa, sumber Dana PBH.

(3) Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pilkades, sumber Dana PBH dan PBK.

c) Sub Bidang Pertanahan

(1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sumber Dana ADD

PONOROGO

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

a) Sub Bidang Pendidikan

(1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Dukungan penyelenggaraan PAUD, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, sumber Dana Desa (APBN)

b) Sub Bidang Kesehatan

(1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa, sumber Dana Desa (APBN) dan PBH.

(2) Penyelenggaraan Posyandu, sumber Dana Desa (APBN) dan PBK.

(3) Pelayanan kesehatan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN) dan PAD.

(4) Pemeliharaan mobil Ambulance Desa, sumber Dana PAD.

PONOROGO

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang

(1) Pemeliharaan jalan Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pemeliharaan jalan usaha tani, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerarasan jalan, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan talud dan plesengan, sumber Dana Desa (APBN)

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

(1) Pembangunan/rehabilatasi/ peningkatan sumber air bersih, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pemeliharaan penerangan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN)

(5) Lain-lain sub bidang pemukiman, sumber Dana PBK.

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(1) Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(1) Penyelenggaraan informasi publik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset, sumber Dana Desa (APBN)

g) Sub Bidang Pariwisata

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata, sumber Dana Desa (APBN)

PONOROGO

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

(1) Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan, sumber ADD dan PBH.

(2) Lain-lain sub bidang ketentraman, ketertiban umum, sumber Dana ADD.

b) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

(1) Pembinaan karangtaruna/ klub kepemudaan olahraga, sumber Dana ADD.

c) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

(1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, sumber Dana ADD.

(2) Pembinaan PKK, sumber Dana ADD

(3) Pembinaan RT/RW, sumber Dana ADD

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

(1) Pembangunan saluran irigasi/tersier, sumber Dana Desa (APBN)

PONOROGO

b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan Aparatur Desa, sumber Dana Desa (APBN)

c) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sumber Dana PBK.

d) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

(1) Pembangunan/rehab Pasar Desa/kios milik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

Dari paparan diatas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Siwalan telah merealisasikan program Desa tahun 2019 yang bersumber dari seluruh pendapatan Desa. Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun realisasi Padat Karya Tunai Dana Desa

PONOROGO

(APBN) untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut:[38]

1) Bidang Pembangunan Desa
   a) Sub Bidang Pendidikan
      (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal, sumber Dana Desa (APBN)
      (2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sumber Dana Desa (APBN)
      (3) Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat, sumber Dana Desa (APBN)
   b) Sub Bidang Kesehatan
      (1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa, sumber Dana Desa (APBN) dan PBH.
      (2) Penyelenggaraan Posyandu, sumber Dana Desa (APBN) dan PBK.
      (3) Pelayanan kesehatan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN) dan PAD.

[38] Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Siwalan Tahun 2019

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang

(1) Pemeliharaan jalan Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pemeliharaan jalan usaha tani, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerarasan jalan, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan talud dan plesengan, sumber Dana Desa (APBN)

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

(1) Pembangunan/rehabilatasi/peningkatan sumber air bersih, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pemeliharaan penerangan pemukiman, sumber Dana Desa (APBN)

(4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan lingkungan, sumber Dana Desa (APBN)

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(1) Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa

f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(1) Penyelenggaraan informasi Publik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

(2) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi, sumber Dana Desa (APBN)

(3) Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset, sumber Dana Desa (APBN)

g) Sub Bidang Pariwisata

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata, sumber Dana Desa (APBN)

2) Bidang pemberdayaan masyarakat.

a) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

(1) Pembangunan saluran irigasi/tersier, sumber Dana Desa (APBN)

b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

(1) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan aparatur Desa, sumber Dana Desa (APBN)

c) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

(1) Pembangunan/rehab pasar Desa/ Kios milik Desa, sumber Dana Desa (APBN)

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pemerintah Desa Siwalan telah menyelesaikan 19 Jenis kegiatan pembangunan Desa dan 3 Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pada beberapa bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan, peningkatan SDM dan bidang ekonomi. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Siwalan telah merujuk pada tujuan dari program Dana Desa. Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dirasa perlu untuk segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan pemenuhan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Adapun pemberdayaan masyarakat Desa melalui bidang pertanian, peternakan kesehatan, dan bidang perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa.

PONOROGO

Berikut wawancara terkait manfaat program pembangunan desa dengan Bapak Prapto, salah satu warga Desa Siwalan.

"Melalui program pemeliharaan/pengerasan jalan lingkungan dapat mempermudah akses transportasi keluar masuk desa serta mempercepat aktivitas perjalanan".[39]

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Zaenal, salah satu warga Desa Siwalan yang memberikan pendapat terkait manfaat program pembangunan/pemeliharaan penerangan jalan desa.

"Sangat bermanfaat untuk masyarakat karena warga desa lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas di waktu malam hari. Saat ini ruas-ruas jalan yang berada di desa sudah ada penerangan sehingga jalan menjadi lebih terang dan mengurangi kecelakaan".[40]

PONOROGO

[39] Prapto, wawancara, Siwalan, 21 Maret 2021
[40] Zaenal, wawancara, Siwalan, 21 Maret 2021.

D. Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya. Pemberdayaan tidak terfokus pada usaha peningkatan daya atau kemampuan, tetapi juga pemberian peran, kewenangan bahkan tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah diberdayakan, mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Merujuk pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui Tri Bina yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato, maka realisasi Padat Karya Tunai Dana Desa dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

PONOROGO

1. Desa Gandu

Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Gandu[41]

No	Upaya	Program	Penguatan/ Pengembangan
1	Bina Manusia	Kegiatan Pelatihan, Pengadaan, Pengembangan	Individu
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelatihan Paralegal Desa	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Individu

[41] Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Gandu Tahun 2018-2019

		Kegiatan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa	Individu
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Individu
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta	Kelembagaan
2	Bina Usaha	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	Usaha/Ekonomi

PONOROGO

3	Bina Lingkungan	Pemeliharaan Saluran Irigasi/ Tersier	Lingkungan

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua program yang telah direalisasikan Pemerintah Desa Gandu mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui: 9 program bina manusia, 1 program bina usaha dan 1 program bina lingkungan.

Berikut wawancara terkait manfaat Bina Manusia dalam bidang kesehatan masyarakat desa dengan Ibu Binti, salah satu kader kesehatan masyarakat di Desa Gandu.

"Pelatihan kader kesehatan masyarakat ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan para kader kesehatan untuk mampu berperan serta dalam mengembangkan program kesehatan di desanya".[42]

Selanjutnya, wawancara terkait Bina Usaha kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDesa desa dengan Bapak Yoyok, salah satu warga Desa Gandu.

"Melalui Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat, meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan

[42] Binti, wawancara, Gandu, 25 Maret 2021.

pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi"[43]

Wawancara terkait Bina Lingkungan pemeliharaan saluran irigasi dengan Bapak Sutris, salah satu warga Desa Gandu.

"*Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para petani Desa Gandu, semula dari saluran tanah , sekarang menjadi saluran permanen sehingga air terdistribusi ke areal persawahan dengan lancar".*[44]

2. Desa Siwalan

Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Siwalan[45]

No	Upaya	Program	Penguatan/ Pengembangan
1	Bina Manusia	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi	Kelembagaan

[43] Yoyok, wawancara, Gandu, 25 Maret 2021
[44] Sutris, wawancara, Gandu, 25 Maret 2021
[45] Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Siwalan Tahun 2018-2019

		Kegiatan Pelatihan, Pengadaan dan Pengembangan	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Individu
		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pengelolaan Kader Kesehatan Masyarakat	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana	Individu
		Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD/ TK dan Guru Taman Pendidikan	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan	Individu dan Kelembagaan
		Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa	Kelembagaan

		Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya.	Individu
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Individu dan Kelembagaan
2	Bina Usaha	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa.	Usaha/Ekonomi
		Kegiatan Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Desa	Usaha/Ekonomi
3	Bina Lingkungan	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Lingkungan
		Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	Lingkungan

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua program yang telah direalisasikan Pemerintah Desa Gandu mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui: 11 program bina manusia, 2 program bina usaha dan 2 program bina lingkungan.

Berikut wawancara terkait manfaat Bina Manusia dengan Bapak Farid selaku Sekretaris Desa Siwalan mengenai Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketrampilan dalam memfasilitasi proses pengusahaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pelestarian program".[46]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Gunung terkait manfaat dari kegiatan rehabilitasi pasar desa dalam hal Bina Usaha.

"Pembenahan sarana dan prasarana pasar Desa Siwalan telah memberikan rasa nyaman bagi para pedagang dan pembeli dalam menjual dan membeli barang-barang kebutuhan"[47]

Wawancara dengan Bapak Kholid, mengenai Bina Lingkungan.

"Manfaat Bina Lingkungan dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup banyak sekali diantaranya lingkungan menjadi lebih sejuk, lebih indah dan hijau, terbebas dari polusi udara serta nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari".[48]

PONOROGO

[46] Farid, wawancara, Siwalan, 28 Maret 2021
[47] Gunung, wawancara, 28 Maret 2021
[48] Kholid, wawancara, 28 Maret 2021

BAB IV

EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DANA DESA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara program Dana Desa telah melaksanakan program-program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban secara tertib dan transparan. Pemerintah Desa memiliki integritas serta SDM yang cukup dalam melaksanakan program Dana Desa. Sehingga pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa yang efektif dapat tercapai.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP tiap Desa. Rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD

untuk dibahas dan disepakati bersama, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, maka rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, dilengkapi dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran belanja kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan Bendahara tiap Desa. Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh setiap Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran. Mengacu teori Siagian, dapat dilihat beberapa hal berikut ini[1] :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari program Dana Desa telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, di gunakan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan dalam program Dana Desa ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.

---

[1] Siagian, "*Manajemen Sumber Daya Manusia",* 77.

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan

   Terdapat beberapa elemen dalam proses analisis dan perumusan kebijakan yaitu dari Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan maupun dari masyarakat umum. Menganalisis dan merumuskan program-program yang akan dilaksanakan kedepan sehingga kebijakan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

4. Perencanaan yang matang.

   Perencanaan program melalui musyawarah Desa, akan dievalusi oleh Bupati kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukan perencanaan program Dana Desa dilakukan dengan matang mengingat panjangnya tahapan yang dilakukan sebelum dapat disahkan.

PONOROGO

5. Penyusunan program yang tepat

Ketepatan penyusunan program terlihat dari proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah Desa dari berbagai elemen yang ada di Desa untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga penyusunan program dapat dilakukan dengan tepat.

6. Tersedianya sarana dan pra sarana kerja

Sarana dan pra sarana kerja dalam program Dana Desa disediakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah Desa perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar semua program yang telah direncanakan bersama berjalan dengan baik. Pemerintah Desa menyusun perencanaan melalui RKPBDesa, selanjutnya menjadi APBDesa disahkan menjadi Peraturan Desa yang menjadi dasar pelaksanaan program Dana Desa.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien terlihat dari ketertiban pengadministrasian pemerintahan Desa dalam pelaksanaan program Dana Desa.

PONOROGO

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem ini telah diatur dalam perundang-undangan tentang Dana Desa melalui Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa, penyampaian laporan realisasi Dana Desa. Selain itu juga ada Tim Pendamping Dana Desa yang dibentuk pemerintah guna mengawal sserta mengevaluasi penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hal diatas, disimpulkan bahwa program-program tersebut dilaksanakan Pemerintahan Desa dengan sangat efektif.

PONOROGO

B. Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Secara umum efektifitas bisa diartikan dengan seberapa jauh tercapainya tujuan dari suatu organisasi atau program. Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara melihat *output* yang dihasilkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk mengukur tingkat efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak, penulis menggunakan teori dari Martani dan Lubis, yaitu tingkat efektivitas diukur menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan sumber *(resource approach)*, pendekatan proses *(process approach)* dan pendekatan sasaran *(goals approach)*.[2]

1. Pendekatan sumber *(resource approach)*. Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

PONOROGO

[2] Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

Pada dasarnya sumber daya tersebut telah disiapkan pemerintah, berupa Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN. Untuk pengajuan dananya, pemerintah Desa diharuskan mengajukan APBDesa tentang rencana pelaksanaan program beserta rincian anggarannya (segi non fisik). Pemerintah Desa mendapatkan dananya melalui program yang dilaksanakan secara swakelola disesuaikan dengan peraturan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. (segi fisik). Berdasarkan hal tersebut diambil kesimpulan bahwa pendekatan sumber *(resource approach)*, pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak dapat dikatakan efektif.

2. Pendekatan proses *(process approach)*.

Proses pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pemerintah Desa sebagai pelaksana telah melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban secara tertib dan

transparan. Adapun teknis pengelolaan Dananya sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP tiap Desa. Rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, maka rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, dilengkapi dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran belanja kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan Bendahara tiap Desa. Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

d. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh setiap Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diambil kesimpulan bahwa pendekatan proses *(process approach)*, pelaksanaan Padat Karya Tunai

Dana Desa di Kecamatan Mlarak dapat dikatakan efektif.

3. Pendekatan sasaran *(goals approach)*

Hasil dari program Dana Desa bisa terlihat dari realisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi Padat karya Tunai Dana Desa.

Desa Gandu :

a. Tahun 2018 Pemerintah Desa Gandu telah merencanakan dan merealisasikan beberapa program Dana Desa pada bidang pembangunan sarana prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun kerja (RKP) dengan total 11 program dengan rincian 4 program pembangunan Desa serta 7 program pemberdayaan Masyarakat Desa.

PONOROGO

No	Kategori Kegiatan	Jenis Kegiatan	Status
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	Pengadaan Penerangan Lampu Lingkungan	Terealisasi
		Pembangunan, Pemeliharaan Drainase	Terealisasi
		Pembangunan Jalan Pemukiman	Terealisasi
		Pembangunan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terealisasi
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Pelatihan, Pengadaan, Pembangunan	Terealisasi
		Pengembangan Kapasitas Pelatihan Paralegal Desa	Terealisasi

PONOROGO

		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Terealisasi
		Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Terealisasi
		Kegiatan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar	Terealisasi
		Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	Terealisasi
		Pelatihan Penguatan Kesiagaan Masyarakat Desa	Terealisasi

PONOROGO

b. Tahun 2019 Pemerintah Desa Gandu telah merencanakan dan merealisasikan beberapa program Dana Desa pada bidang pembangunan sarana prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun kerja (RKP) dengan total 17 program dengan rincian 15 program pembangunan Desa serta 2 program pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
No	**Kategori Kegiatan**	**Jenis Kegiatan**	**Status**
1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	Terealisasi
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Terealisasi

		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Terealisasi
		Bantuan Inentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Terealisasi
2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	Terealisasi
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Terealisasi
		Pembangunan Jalan Lingkungan	Terealisasi
		Pembanguan Jalan Usaha Tani	Terealisasi
		Pembangunan Jembatan Milik Desa	Terealisasi
		Pembangunan Talud dan Plesengan	Terealisasi

PONOROGO

		Pembangunan/ Rehabilitasi Gapura/ Batas Desa	Terealisasi
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Terealisasi
		Pembangunan Penerangan Lingkungan Pemukiman	Terealisasi
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Terealisasi
6	Sub Bidang Pariwisata	Lain-lain Sub Bidang Pariwisata	Terealisasi

PONOROGO

Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat			
NO	**Kategori Kegiatan**	**Jenis Kegiatan**	**Status**
1	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak	Terealisasi
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Terealisasi

PONOROGO

Desa Siwalan :

a. Tahun 2018 pemerintah Desa Siwalan telah merencanakan dan merealisasikan beberapa program Dana Desa pada bidang pembangunan sarana prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun kerja (RKP) dengan total 19 program dengan rincian 7 program pembangunan Desa serta 12 program pemberdayaan Masyarakat Desa.

No	**Kategori Kegiatan**	**Jenis Kegiatan**	**Status**
1	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	Terealisasi
		Kegiatan Pembanguan Jalan Pemukiman	Terealisasi

PONOROGO

		Kegiatan Pengadaan Penerangan Lampu Lingkungan	Terealisasi
		Kegiataan Pembangunan, pengembangan & Pemeliharaan	Terealisasi
		Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong	Terealisasi
		Kegiatan Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terealisasi
		Kegiatan Pengadaan dan pembangunan instalasi Pengolahan Sampah	Terealisasi

PONOROGO

2	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi	Terealisasi
		Kegiatan Pelatihan, Pengadaan & Pengembangan	Terealisasi
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terealisasi
		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Terealisasi
		Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Terealisasi

PONOROGO

		Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana	Terealisasi
		Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD/TK & Guru Taman Pendidikan	Terealisasi
		Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan	Terealisasi
		Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa	Terealisasi
		Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terealisasi

PONOROGO

		Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya	Terealisasi
		Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	Terealisasi

b. Tahun 2019 Pemerintah Desa Siwalan telah merencanakan dan merealisasikan beberapa program Dana Desa pada bidang pembangunan sarana prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun kerja (RKP) dengan total 22 program dengan rincian 19 program pembangunan Desa serta 3 program pemberdayaan Masyarakat Desa.

PONOROGO

No	Kategori Kegiatan	Jenis Kegiatan	Status
Bidang Pembangunan Desa			
1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TPQ/ Madrasah NonFormal	Terealisasi
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Terealisasi
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Terealisasi
2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Terealisasi
		Penyelenggaraan Posyandu	Terealisasi

PONOROGO

		Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terealisasi
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Terealisasi
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terealisasi
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerarasan Jalan	Terealisasi
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Talud dan Plesengan	Terealisasi
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilatasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih	Terealisasi

PONOROGO

		Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas	Terealisasi
		Pemeliharaan Penerangan Pemukiman	Terealisasi
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Penerangan Lingkungan	Terealisasi
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Terealisasi
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Terealisasi

PONOROGO

		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi	Terealisasi
		Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset	Terealisasi
7	Sub Bidang Pariwisata	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang pariwisata	Terealisasi
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pembangunan Saluran Irigasi/Tersier	Terealisasi
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	Terealisasi

3	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Terealisasi

Berdasarkan data realisasi dan perencanaan diatas diambil kesimpulan bahwa pendekatan sasaran *(goals approach)*, pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak dapat dikatakan efektif.

PONOROGO

C. Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya adalah usaha untuk memandirikan/memberdayakan masyarakat. Usaha untuk memandirikan/memberdayakan masyarakat Desa diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Program Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan Masyarakat Desa. Mengacu pada tiga upaya pokok pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dan Soebiato[3], yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan, Pemerintahan Desa Kecamatan Mlarak telah melaksanakan program-program dengan lingkup sebagai berikut:

1. Desa Gandu

a. Bina Manusia.

Bina Manusia adalah upaya pemberdayaan masyarakat. untuk memperbaiki mutu

[3] Soleh, *"Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan",* (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87.

kehidupan masyarakat. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yang meliputi: pengembangan individu, pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat meliputi :

1) Kegiatan Pelatihan, Pengadaan, Pengembangan untuk meningkatkan kapasitas individu
2) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelatihan Paralegal Desa untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
3) Kegiatan Pengelolaan Posyandu untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
4) Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu

PONOROGO

5) Kegiatan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
6) Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas individu
7) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kapasitas individu
8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
9) Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

b. Bina Usaha

Bina Usaha adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gandu telah melakukan pembinaan masyarakat melalui Kegiatan Pendirian dan Pengembangan

BUM Desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

c. Bina Lingkungan

Adapun program yang berkaitan dengan bina lingkungan, hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Gandu Kecamatan Mlarak merealisasikanya melalui kegiatan pemeliharaan saluran irigasi..

2. Desa Siwalan

a. Bina Manusia.

Bina Manusia adalah upaya pemberdayaan masyarakat. untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yang meliputi: pengembangan individu, pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan masyarakat yang sudah dilakukan seperti :

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
2) Kegiatan Pelatihan, Pengadaan dan Pengembangan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan.
3) Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu
4) Kegiatan Pengelolaan Posyandu untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
5) Kegiatan Pengelolaan Kader Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
6) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kapasitas individu
7) Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD/ TK dan Guru Taman Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan

8) Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan
9) Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.
10) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya untuk meningkatkan kapasitas individu.
11) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan.

b. Bina Usaha

Bina Usaha adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Siwalan telah melakukan pembinaan masyarakat melalui Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa serta Kegiatan Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

c. Bina Lingkungan

Adapun program yang berkaitan dengan bina lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak merealisasikanya melalui kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan kegiatan pemeliharaan saluran irigasi.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tahun 2018 serta tahun 2019 berjalan dengan efektif. Diuraikan melalui kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan pra sarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adapun pengelolaan keuangan, pemerintah Desa mengelola keuangan desa berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban secara tertib dan transparan.

2. Tingkat keefektivitasanya dapat dikategorikan cukup efektif. Diuraikan melalui pendekatan sumber *(resource approach)*, pemerintah Desa berhasil mendapatkan sumber-sumber pemberdayaan, baik fisik maupun non fisik. Pendekatan proses *(process approach)* pemerintah Desa melaksanakan program Dana Desa dengan sangat efektif karena pelaksananaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan pengelolaan keuangan secara tertib dan transparan. Pendekatan sasaran *(goals approach)* ditunjukan dengan macam-macam *output* yang dihasilkan dari program yang direncanakan telah sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Padat Karya Tunai Dana Desa telah memberikan dampak yang positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa. Dampak-dampak tersebut terlihat dalam realisasi program dana tahun 2018 dan tahun 2019 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa semuanya mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

B. Saran - saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini:

1. Bagi IAIN Ponorogo, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa dan diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah.
2. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, saran dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program kedepan untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
3. Bagi peneliti, kedepannya diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di Desa Gandu serta Desa Siwalan saja, akan tetapi keseluruhan Desa di lingkup wilayah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai objek dalam penelitiannya.

PONOROGO

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa 2018 untuk Padat Karya Tunai.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: RinekaCipta, 2006)

Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018)

Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).

Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000).

Marnis, Priyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008)

Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai.

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan dana Desa Tahun 2018, Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa..

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana desa.

Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai.

Peraturan Desa Siwalan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Siwalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Prastiya, Yogi Eka. "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo".* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2014

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Soleh, *Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokusmedia, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *MetodePenelitianPendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sanrego, Yulizar D dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

Soleh, *Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokusmedia, 2014)

Theresia, Aprillia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015)

PONOROGO

IAIN
PONOROGO